

## **Desekuritisasi Agama dalam Pemilu**

Yusli Effendi\*

Pemilu legislatif (pileg) baru saja usai, namun pesan singkat berantai bernada kampanye tak hendak berhenti. Kita malah hari-hari ini mendapati penggunaan isu agama untuk menyebarkan stigma buruk pada calon presiden yang diusung parpol tertentu lewat telepon di genggamannya kita. Atas nama kepentingan politik, sentimen primordial dijadikan jualan yang justru mengancam harmoni dan keutuhan bangsa.

Upaya untuk mencegah kampanye yang menyebarkan kebencian (hate speech) sejatinya telah banyak dilakukan sebelum pileg lalu. Tak hanya KPU dan Bawaslu, dari masyarakat juga muncul Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKIB) yang didukung oleh beragam ormas untuk melawan perilaku dan praktik-praktik intoleransi dan diskriminasi lewat kampanye (Sindonews, 13/1). Elemen lain seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) di sejumlah daerah, juga Menteri Agama, banyak mengkampanyekan pelarangan politisasi agama sebagai materi kampanye.

Meski hasil sementara pileg 2014 menunjukkan bahwa isu agama atau keislaman seperti syariah Islam tak lagi laku sebagai penarik perhatian pemilih—dibuktikan dengan kian populisnya partai-partai Islam—politik identitas tak berarti mati. Ikatan kesukuan beserta dengan tautan keagamaan (ethno-religious nationalism), masih menjadi komoditas panas untuk memantik fanatisme kelompok dan memojokkan lawan politik yang berbeda.

Di sisi ini, kemajemukan Indonesia tak hanya menyimpan berkah, namun juga bisa menjadi titik api bencana. Keragaman suku bangsa dan agama bisa menjadi bencana jika ditunggangi oleh kepentingan politik dengan menjadikannya komoditas.

### **Politisasi dan Sekuritisasi Agama**

Agama, khususnya Islam, masih tak bisa dinafikan dalam perpolitikan kita. Selain karena secara historis Islam telah mengakar kuat dalam masyarakat, mayoritas penduduk Indonesia (87%) adalah pemeluk Islam. Maka tidak mungkin meninggalkan isu agama sebagai magnet saat berkampanye di tengah masyarakat mayoritas muslim (Bahtiar Effendy, 2013). Tak heran, banyak terjadi kasus politisasi agama saat kampanye pileg lalu. Di Malang, misalnya, seorang caleg Nasrani menggunakan lafadz basmalah dalam spanduk dan balihonya untuk menarik dukungan pemilih yang justru membuatnya diprotes oleh masyarakat dan MUI setempat.

Namun yang kita lihat akhir-akhir ini bahkan beranjak makin jauh. Kini yang terjadi bukan hanya politisasi, yakni memakai atau memperalat agama demi kepentingan politik, namun malah sekuritisasi agama. Secara sederhana sekuritisasi ialah upaya untuk menjadikan suatu isu menjadi isu keamanan dalam ruang publik. Jika keamanan adalah soal kelangsungan hidup

(survival), maka sekuritisasi agama meniscayakan pewacanaan adanya ancaman eksistensial terhadap suatu agama.

Di balik sekuritisasi agama, meski motif sebenarnya ialah perebutan sumber daya politik atau ekonomi, namun wacana yang dibangun (speech act) oleh elit politik adalah soal keberlangsungan atau hidup-mati suatu agama. Begitu kuatnya faktor agama ini dalam memengaruhi publik sehingga elit politik yang terdidik pun tergoda untuk menggunakannya. Isu (bahkan fatwa) pelarangan presiden perempuan yang mampu menjegal Megawati menjadi presiden pada pemilu 1999, misalnya, menandai bukti suksesnya sekuritisasi agama dalam pemilu paskareformasi. Masa paskareformasi memang menjadi masa subur politik identitas, maka pada pemilu 2004, 2009, hingga pemilu capres 9 Juli 2014 nanti, masih akan kita lihat pola-pola yang sama dipraktikkan politisi kita.

### **Menyiram Titik Api: Desekuritisasi**

Di masa-masa paska-pemilu legislatif ini, kemajemukan Indonesia bisa menjadi titik api bencana. Politik identitas yang bertumpukan pada fanatisme kesukuan dan agama akan sangat rentan dimainkan dan dijadikan komoditas politik. Jika isu korupsi atau keburukan capres tak cukup kuat untuk menjatuhkan lawan politik dan memikat pemilih, para political entrepreneur akan memainkan (lagi) isu suku dan agama dengan mewacanakan polarisasi antara capres muslim dengan capres non-muslim atau capres Jawa dengan capres non-Jawa.

Pewacanaan dikotomi mayoritas-minoritas ini pada akhirnya hanya melahirkan kebencian di masing-masing pihak akibat adanya politik dominasi. Inilah titik api bencana yang mampu memantik kekerasan dan menggerogoti kebhinekaan. Ukuran sukses kita sebagai bangsa tak hanya ditentukan lewat pelaksanaan prosedur demokrasi seperti pemilu yang bebas, jujur, dan adil, namun juga kemampuan kita dalam menghadirkan perlindungan bagi kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Inilah yang membedakan “demokrasi pemilu” dan “demokrasi konstitusional” (Plattner, 1998).

Pencitraan sebagai negara demokrasi terbesar setelah India dan AS serta negara demokrasi Muslim terbesar tak hanya meniscayakan konsistensi Indonesia dalam praktik toleransi antarumat beragama untuk menguatkan soft power di mata masyarakat internasional, lebih daripada itu adalah komitmennya untuk melindungi segenap anak bangsa, apapun agama dan suku bangsanya, dengan menjamin kebebasan beragama serta keberadaan mereka sesuai amanat konstitusi.

Upaya desekuritisasi agama dengan tak lagi mewacanakan isu ancaman eksistensial terhadap Islam dalam proses pemilu akan membantu memadamkan titik api kebencian akibat dikotomisasi mayoritas-minoritas. Sudah saatnya kita beranjak menapaki demokrasi yang berkeadaban dengan menjadikan pemilu sebagai jalan untuk menciptakan kesejahteraan, meninggikan kemaslahatan, serta menegakkan keadilan baik secara ekonomi maupun politik.

Kolom Koran Sindo, Jum'at 25 April 2014

---

\* Pengajar FISIP Universitas Brawijaya